



Bendera Bajak Laut di Negara Bajakan: Semiotika Perlawanan terhadap Nasionalisme Palsu dan Kekuatan Rakyat

Mohammad Fikri ^{1*}, Fajar Ainol Yakin ², Muhammad Muslim ³

¹⁻³ Sekolah Tinggi IlmuSyariah Nurul Qarnain, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kec. Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68194

Korespondensi penulis: rindumaulid@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of the use of the Jolly Roger symbol, a pirate flag, in the anime One Piece by Indonesians during Independence Day in August 2025 gave rise to an interesting symbolic battle between representations of the people and the state. In this context, this article explores how popular cultural symbols can be used as a tool of visual resistance against state nationalism that is considered to be losing legitimacy, especially in the increasingly connected digital era. The Jolly Roger symbol, known as the pirate flag, is not only seen as a symbol of freedom in pop culture, but also as an expression of rejection of nationalist narratives that are considered "fake" or not representing the interests of the people. Using Roland Barthes's semiotic approach (denotation, connotation, myth) and Gramsci's and Stuart Hall's theories of cultural hegemony, this article analyzes the layered meanings of the Jolly Roger symbol in the Indonesian socio-political context. In this semiotic analysis, the symbol is understood not only as an image representing freedom or rebellion, but also as a tool to express dissatisfaction with narratives of independence and citizenship dominated by the state. Data obtained from social media posts (X/Twitter, TikTok, Instagram), memes, captions, and official statements were semiotically analyzed to see how this symbol is used to challenge the state's sole claim to the meaning of nationalism. The results show that this pirate symbol functions beyond aesthetic resistance; it also functions ideologically by creating space for alternative articulations of identity and nationhood. In a digital context, this symbol voices criticism of official narratives of independence and citizenship, opens up a crisis in existing hegemonic narratives, and creates a space for people to freely express their views and identities.*

Keywords: *hegemony, nationalism, popular culture, semiotics, social media, symbolic resistance*

Abstrak. Fenomena penggunaan simbol Jolly Roger, bendera bajak laut, dalam anime One Piece oleh masyarakat Indonesia selama bulan kemerdekaan Agustus 2025 menimbulkan pertarungan simbolik yang menarik antara representasi rakyat dan negara. Dalam konteks ini, artikel ini mengeksplorasi bagaimana simbol budaya populer dapat dijadikan alat resistansi visual terhadap nasionalisme negara yang dianggap kehilangan legitimasi, khususnya dalam era digital yang semakin terhubung. Simbol Jolly Roger, yang dikenal sebagai bendera bajak laut, bukan hanya dipandang sebagai lambang kebebasan dalam budaya pop, tetapi juga menjadi ekspresi penolakan terhadap narasi nasionalisme yang dianggap "palsu" atau tidak mewakili kepentingan rakyat. Menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes (denotasi, konotasi, mitos) dan teori hegemoni budaya dari Gramsci serta Stuart Hall, artikel ini menganalisis makna berlapis dari simbol Jolly Roger dalam konteks sosial-politik Indonesia. Dalam analisis semiotik ini, simbol tersebut dipahami tidak hanya sebagai gambar yang merepresentasikan kebebasan atau pemberontakan, tetapi juga sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap narasi kemerdekaan dan kewarganegaraan yang didominasi oleh negara. Data diperoleh dari unggahan media sosial (X/Twitter, TikTok, Instagram), meme, caption, serta pernyataan pejabat yang dikaji secara semiotik untuk melihat bagaimana simbol ini digunakan untuk menggugat klaim tunggal negara terhadap makna nasionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol bajak laut ini berfungsi lebih dari sekadar melawan secara estetis; ia juga berfungsi secara ideologis dengan menciptakan ruang untuk artikulasi alternatif mengenai identitas dan kebangsaan. Dalam konteks digital, simbol ini menyuarakan kritik terhadap narasi resmi mengenai kemerdekaan dan kewarganegaraan, membuka krisis dalam narasi hegemonik yang ada, serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan pandangan dan identitas mereka secara bebas.

Kata kunci: hegemony, nationalism, popular culture, semiotics, social media, symbolic resistance

1. LATAR BELAKANG

Bulan Agustus di Indonesia secara historis diposisikan sebagai ruang simbolik nasionalisme, di mana atribut merah-putih menguasai ruang publik, dari institusi negara hingga media sosial. Namun pada Agustus 2025, muncul gejala visual yang mengganggu formasi simbolik resmi tersebut: bendera bajak laut *Jolly Roger* dari anime *One Piece* bermunculan di kendaraan pribadi, poster-poster jalanan, dan unggahan netizen. Fenomena ini segera memicu reaksi keras dari pejabat negara, termasuk Pimpinan MPR yang menyebutnya “provokatif” dan “berpotensi memecah belah bangsa”. Reaksi semacam itu mengindikasikan bukan sekadar ketidaksenangan terhadap estetika, tetapi kegelisahan negara atas ancaman simbolik terhadap makna nasionalisme yang selama ini dimonopoli. Pertanyaannya: mengapa bendera fiksi dianggap cukup berbahaya hingga menyinggung martabat negara?

Fenomena ini memperlihatkan perebutan ruang makna antara simbol negara dan simbol rakyat. Nasionalisme yang selama ini diklaim sebagai milik negara dipertanyakan keabsahannya oleh publik yang merasa kecewa terhadap arah politik dan hukum. Simbol *Jolly Roger* bukan sekadar ekspresi fandom, melainkan bentuk artikulasi perlawanan yang menggugat representasi kekuasaan yang dianggap korup, anti-demokratis, dan manipulatif. Dalam situasi ini, simbol visual berubah menjadi arena konflik ideologis, di mana warga tidak lagi sekadar memaknai, tetapi juga memproduksi ulang makna untuk melawan dominasi simbolik negara (Irawanto, 2020). Simbol alternatif muncul sebagai cara rakyat menolak representasi nasionalisme yang semakin dipolitisasi dan tidak merepresentasikan aspirasi publik.

Penelitian ini menjadi penting untuk membongkar bagaimana simbol visual yang dianggap remeh seperti bendera bajak laut sebetulnya menyimpan daya kritik yang kuat terhadap formasi kekuasaan. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis penggunaan *Jolly Roger* sebagai bahasa tandingan yang merepresentasikan kekecewaan kolektif terhadap sistem politik saat ini. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa di era media digital, simbol tak lagi hanya diciptakan oleh negara, tetapi juga oleh warganet yang secara aktif menafsirkan ulang dan mendistribusikannya secara viral (Moleong & Sundari, 2021). Dengan demikian, simbol bukan hanya menjadi ekspresi, tetapi juga senjata diskursif dalam medan politik simbolik. Urgensi kajian ini terletak pada kemampuannya membaca krisis representasi nasionalisme melalui dimensi visual dan digital yang kian mendominasi ruang publik.

Secara teoretik, artikel ini menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk membaca lapisan makna dalam simbol *Jolly Roger*. Barthes membagi makna menjadi tiga: denotatif (makna literal), konotatif (asosiasi budaya), dan mitos (ideologi yang disamarkan

sebagai kebenaran alamiah) (Barthes, 1977). Di sini, simbol bajak laut tidak lagi sekadar tengkorak dan tulang bersilang, tetapi bertransformasi menjadi mitos tandingan terhadap narasi negara. Gagasan Antonio Gramsci tentang hegemoni menjadi penting untuk melihat bagaimana negara mempertahankan kuasa melalui dominasi simbol dan konsensus yang dipaksakan (Forgacs, 2020). Sementara teori Stuart Hall mengenai representasi dan decoding membantu menjelaskan bagaimana publik dapat membaca dan memproduksi makna secara oposisi terhadap narasi dominan (Hall, 2021). Kombinasi kerangka ini memberi alat baca kritis terhadap konflik simbolik dalam lanskap media sosial hari ini.

Berdasarkan latar dan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana simbol bajak laut digunakan rakyat untuk menginterupsi makna nasionalisme resmi dalam lanskap politik yang semakin represif. Penelitian ini tidak hanya membedah simbol sebagai bentuk ekspresi, tetapi juga sebagai taktik kultural dalam menantang hegemoni negara. Dengan menganalisis visualisasi *Jolly Roger* di media sosial dan reaksi negara terhadapnya, artikel ini menyuguhkan pembacaan baru atas dinamika simbol dan kuasa di Indonesia pascareformasi. Di tengah krisis legitimasi dan pembusukan demokrasi, simbol visual berubah menjadi bahasa politik yang ringkas, viral, dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, simbol bukan lagi ornamen, tetapi medan perlawanan itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendasarkan pengumpulan data pada dokumentasi daring. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menangkap makna simbolik yang dibangun masyarakat melalui simbol visual *Jolly Roger*. Studi serupa yang membahas representasi visual sebagai aksi sosial menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam memahami kritik politik berbasis tanda (Sitalaksmi, 2023). Penelitian ini juga sejajar dengan studi semiotik media sosial yang meneliti meme sebagai medium kritik sasaran politik digital (Rahardi & Amalia, 2022). Oleh karena itu, metode kualitatif sangat sesuai untuk menggali lapisan makna dalam simbol tandingan yang digunakan di ruang publik digital.

Kerangka konsep utama yang digunakan adalah semiotika Roland Barthes, yang memetakan tiga lapis makna: denotasi, konotasi, dan mitos. Analisis mengikuti model Barthes seperti yang diterapkan dalam studi semiotik iklan atau simbol budaya populer (Madani & Ambarwati, 2023). Pada lapis mitos, simbol dapat berfungsi sebagai idiom ideologis yang menyembunyikan hubungan kuasa (Barthes, 1977). Namun penelitian ini memperbarui kerangka dengan memfokuskan bahwa *Jolly Roger* berkembang menjadi mitos resistansi

rakyat yang menuntut keadilan. Dalam kerangka tersebut, simbol tidak hanya dibaca secara literal, tetapi dibaca sebagai perlawanan ideologis atas narasi resmi.

Objek kajian penelitian terdiri dari tiga kategori utama: (1) unggahan media sosial yang menampilkan simbol *Jolly Roger* di X/Twitter, Instagram, dan TikTok; (2) narasi reaksi pejabat negara yang diliput media massa; dan (3) narasi visual dan teks seperti meme, caption, video, serta komentar warganet. Pengkategorian ini mirip dengan pola pengelompokan dalam studi semantik media sosial mengenai simbol digital (Lestari & Agustian, 2024). Penelitian memanfaatkan pengumpulan *screenshot*, arsip unggahan, dan pemantauan pemberitaan daring sebagai bahan penelitian primer.

Teknik pengumpulan data terdiri dari media monitoring, pengunduhan unggahan visual (misalnya meme, video, komentar), serta arsip pemberitaan tentang reaksi pejabat negara. Langkah ini mengadopsi metode dokumentasi daring seperti yang diterapkan dalam penelitian fenomena narasi daring di Indonesia (Danaditya et al., 2022). Data dikumpulkan selama periode Juli–Agustus 2025, mencakup periode menjelang dan pasca momentum kemerdekaan. Prosedur operasional mencakup identifikasi unggahan yang relevan, klasifikasi visual menurut simbol bajak laut, dan pengorganisasian narasi pejabat secara kronologis.

Teknik analisis data menggunakan analisis semiotik Barthes secara sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi makna denotatif atas tanda apa yang tampak, yaitu tengkorak dan topi jerami. Kedua, makna konotatif dianalisis melalui asosiasi simbolik seperti pemberontakan dan kebebasan. Ketiga, lapis mitos dibongkar sebagai ideologi resistansi rakyat terhadap kuasa yang menindas. Studi terdahulu yang memaparkan analisis tiga lapis terhadap konten media sosial menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memahami produksi makna visual rakyat (Ishlah et al., 2024).

Selanjutnya, teori hegemoni budaya dari Gramsci dan representasi Stuart Hall digunakan untuk menafsirkan dinamika kuasa dalam perebutan makna simbol. Hall menekankan bahwa masyarakat bisa melakukan *reading oposisi* terhadap interpretasi dominan (Hall, 1980), sedangkan Gramsci menjelaskan legitimasi ideologis melalui konsensus simbolik. Kombinasi teori ini membantu menjelaskan bagaimana simbol rakyat muncul sebagai representasi oposisi terhadap nasionalisme resmi yang dipaksakan.

Dalam analisis representasi, penelitian membandingkan narasi resmi simbol *Merah Putih* dan simbol rakyat *Jolly Roger*. Reaksi pejabat negara yang mencap simbol rakyat sebagai provokatif atau memecah bangsa dianalisis sebagai upaya mempertahankan kontrol atas makna nasionalisme. Pemahaman ini memperlihatkan kekuasaan negara menggunakan wacana

dominan untuk menegakkan hegemoni simbolik, sebagaimana diteorikan dalam literatur hegemoni kultural (Hall & Gramsci).

Kesimpulannya, metode ini memungkinkan peneliti untuk membaca lapisan makna visual dan ideologi yang tersembunyi dalam simbol alternatif. Dengan menggabungkan observasi visual, analisis naratif, dan teori kritis, penelitian ini berhasil mengungkap resistansi simbolik rakyat sebagai bentuk delegitimasi terhadap narasi kekuasaan. Metode ini dikembangkan untuk menunjukkan bahwa simbol yang beredar dalam ruang digital bukan hanya estetika fanatik, melainkan sarana ideologis yang menyuarakan keadilan rakyat terhadap kekuasaan yang menciderai demokrasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Denotatif dan Konotatif Jolly Roger

Secara nyata, bendera *Jolly Roger* adalah simbol bajak laut yang menampilkan tengkorak dengan topi jerami ikon yang langsung dikenali oleh penggemar *One Piece* (Adyan, 2025). Ketika dikibarkan oleh warga Indonesia menjelang Agustus 2025, makna literalnya adalah sebagai representasi fandom terhadap serial anime Jepang tersebut. Tidak sedikit orang melihat ini sebagai cara kreatif generasi muda menyalurkan kecintaan terhadap budaya populer. Namun, kehadiran bendera itu di ruang publik selama momentum kemerdekaan memunculkan pertanyaan: apakah ini sekadar estetika visual atau ada makna yang lebih dalam? Penempatan bendera bajak laut berdampingan dengan Merah Putih menunjukkan bahwa simbol ini tidak dipandang sebelah mata.

Pada level konotatif, bendera *Jolly Roger* kerap diasosiasikan dengan kebebasan dan pemberontakan terhadap otoritas (Adyan, 2025). Nilai kebebasan dalam *One Piece* sangat resonan dengan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap korup atau represif. Banyak netizen menafsirkan simbol ini sebagai ekspresi kekecewaan kolektif terhadap realitas sosial-politik Indonesia hari ini. Impresi tersebut muncul kuat dari komentar seperti “Merah putih terlalu sakral di negara yang korup” yang menempatkan *Jolly Roger* sebagai simbol alternatif perjuangan rakyat biasa. Simbol ini bukan hanya cetak biru visual, melainkan kenyataan emotif yang mengombinasikan fandom dengan kritik sosial.

Lebih dalam, simbol topi jerami pada tengkorak menyiratkan solidaritas dan impian kolektif nilai yang dipegang oleh kru Topi Jerami dalam *One Piece* (Sujaya, 2025). Simbol itu kemudian dimaknai sebagai representasi warga yang merindukan perjuangan bersama demi keadilan dan kebebasan politik. Ketika generasi muda memasang simbol ini di kendaraan atau media sosial, mereka cenderung menyuarakan solidaritas terhadap sesama warga yang merasa

terpinggirkan. Bendera itu pun menjadi suara visual terhadap mereka yang terhambat oleh sistem yang tidak responsif. Dengan demikian, simbol bajak laut ini tampil sebagai ekspresi keinginan untuk meretas penindasan operasional dan struktural.

Simbol bajak laut ini juga digunakan sebagai sindiran terhadap narasi nasionalisme yang dipertahankan oleh rezim (Adyan, 2025; Kompasiana, 2025). Bagi sebagian masyarakat, nasionalisme resmi dianggap hanya legitimasi simbolik; bendera *Jolly Roger* menawarkan suara tandingan yang lebih jujur. Unggahan warganet dengan tagar seperti “no viral no justice” menandai ketidakpercayaan terhadap klaim nasionalisme yang tidak diiringi substansi keadilan publik. Simbol ini menjadi kiasan visual bagi rakyat yang kecewa terhadap slogan-slogan kebangsaan yang menurut mereka kosong. Maka bendera itu tak lagi sekadar estetis, tapi alat kritik yang pedas.

Menurut Roland Barthes, simbol bisa berkembang menjadi mitos yang membentuk ideologi terselubung (Hall, 2016; Ferrell et al., 2008). Dalam analisis mitos semiotika, *Jolly Roger* berubah menjadi narasi bahwa kekuasaan yang mengklaim mewakili rakyat sesungguhnya telah dikhianati oleh rezim. Makna sepintas tentang kebebasan berubah menjadi simbol bahwa rakyat telah dijajah kembali oleh institusi negara yang tak berpihak. Mitos ini berfungsi sebagai katalis resistansi; rakyat yang menggunakan simbol ini diajak mempertanyakan legitimasi negara dan otoritasnya. Dengan demikian, simbol anime itu menembus realitas politik lokal dan menjadi bahasa ideologis tandingan.

Bendera Merah Putih adalah simbol resmi nasionalisme formal, tetapi penggunaan *Jolly Roger* semakin terlihat sebagai simbol de facto nasionalisme rakyat (Sapo, 2025; MerahPutih, 2025). Generasi muda yang merasa diabaikan oleh narasi kebangsaan resmi memandang simbol bajak laut ini lebih mengena dan memperkuat identitas kolektif. Ini juga menunjukkan bagaimana simbol alternatif dapat berdiri sejajar secara visual, meskipun tidak legal formal, namun kuat secara makna. Bahkan kritik negara terhadap pengibaran simbol ini justru memperkuat makna simbolik itu sendiri. Perlawanan rakyat terhadap monopoli simbol menjadi materi analisis bahwa simbol-simbol populer dapat melawan dominasi makna negara.

Visual bendera bajak laut dipakai bukan hanya sebagai gaya visual, melainkan sebagai bahasa politik baru yang lebih inklusif dan subversif (Adyan, 2025; Kompasiana, 2025). Ketika ditempel di kendaraan, rumah, atau dijadikan avatar media sosial, simbol ini secara visual menyampaikan protes yang dikemas dalam budaya populer. Praktik visual ini menysar emosi dan imajinasi khalayak, memproduksi narasi perlawanan secara masif dan spontan. Penggunaan simbol fiksi menjadi taktis untuk menghindari sensor langsung, tetapi tetap

menyampaikan pesan politik. Rakyat mengadopsi simbol ini sebagai bahasa ekspresi bahwa kritik dapat hadir tanpa harus turun ke jalan.

Dalam analisis denotatif hingga mitos, simbol *Jolly Roger* jelas lebih dari sekadar elemen fandom ia berubah menjadi bahasa rakyat yang menginterupsi makna nasionalisme resmi. Barisan simbol ini mempertanyakan legitimasi rezim yang dinilai mencederai hukum dan demokrasi (Adyan, 2025). Ia menandai bahwa simbol visual dapat menjadi ruang resistansi politik yang kuat, di mana generasi muda mengekspresikan keresahan mereka terhadap sistem yang diam-diam menindas. Bendera bajak laut ini menegaskan bahwa budaya populer kini menjadi medium penting untuk menyuarakan keadilan. Sebagai mini kesimpulan, simbol ini telah menjadi bahasa baru rakyat untuk menggugat kekuasaan yang telah kehilangan legitimasi moral dan hukum.

Bajak Laut vs Negara Bajakan: Semiotika Konflik Kuasa

Bendera *Jolly Roger* dari *One Piece* muncul sebagai simbol tantangan yang menantang dominasi simbol nasional resmi Merah Putih. Representatif parlemen Sufmi Dasco Ahmad bahkan menuduh tren penggunaan bendera tersebut sebagai upaya terkoordinasi untuk membelah bangsa (Dasco Ahmad, 2025). Dalam kerangka teori hegemonik Gramsci dan Hall, ini menunjukkan bahwa simbol resmi diklaim sebagai satu-satunya representasi patriotisme. Namun, rakyat melalui simbol bajak laut mencoba merebut kembali legitimasi simbol nasional dari atas ke bawah. Dinamika ini menjelaskan bagaimana simbol populer bisa mengusik tatanan makna yang dikendalikan oleh negara dan elit.

Respons negara terhadap bendera ini menunjukkan usaha mempertahankan hegemoni simbolik. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan mengingatkan bahwa penggunaan simbol asing dapat mengancam kehormatan bendera nasional dan mengganggu persatuan (Gunawan, 2025). Ungkapan serupa dikemukakan oleh pejabat kementerian dalam negeri yang menekankan bahwa Merah Putih seharusnya tetap menjadi simbol yang “mengikat bangsa” (Baharuddin, 2025). Kritik terhadap simbol rakyat ini dipakai sebagai strategi dominasi makna; negara menegaskan siapa yang berhak menentukan makna nasionalisme dan siapa simbol yang sah.

Perseteraan makna ini menjadi wacana hegemoni; simbol rakyat (*Jolly Roger*) berfungsi sebagai counter-hegemonic sign yang menyerang narasi nasionalisme resmi. Perspektif Barthes memperlihatkan bahwa di lapisan mitos, bajak laut ini melambangkan ide bahwa rakyat terjajah kembali oleh rezim yang tak lagi pantas mewakili suara kemerdekaan (Barthes, 1977; realisasi lokal mutakhir dijabarkan oleh studi resistansi simbolik). Sementara itu, Hall menyatakan bahwa masyarakat bisa melakukan “reading oposisi” terhadap pesan dominan dan

menciptakan representasi alternatif (Hall, 1980). Hal ini menjadi nyata ketika warganet menggunakan simbol bajak laut sebagai upaya menolak narasi negara yang dianggap menipu demokrasi.

Penggunaan simbol *Jolly Roger* juga menandai disruptif terhadap ritual nasional yang dianggap formalistik. Negara berusaha memonopoli tanda kebangsaan; rakyat menggunakan simbol alternatif untuk memperlihatkan penolakan terhadap legitimasi simbol yang “hampa”. Nilai-nilai pemberontakan dan kebebasan yang dipancarkan simbol itu menantang klaim negara bahwa Merah Putih adalah simbol toleransi dan keadilan universal. Di sini terlihat pertarungan simbolik di mana rakyat mengartikulasikan ulang makna kebangsaan melalui simbol yang lebih emosional dan simbolik.

Budaya populer *One Piece* memainkan peran penting dalam kanal ekspresi politik anak muda yang sering merasa terpinggirkan dari narasi resmi. Simbol bajak laut menjadi representasi ideologi visual yang mudah diakses dan kuat secara emotif. Penelitian tentang budaya populer dan politik menyebutkan bahwa simbol dari fandom yang dibawa ke ruang politik dapat mengganggu tatanan makna yang mapan (Aistrophe, 2020). Generasi muda memilih simbol ini karena resonansinya lebih kuat dibanding simbol resmi yang dianggap steril.

Legenda bajak laut dalam narasi rakyat juga mengungkap adanya mitos baru yang diperjuangkan rakyat. Simbol ini merefleksikan cerita rakyat yang menolak kekuasaan yang menindas dan merampas keadilan. Barthes menjelaskan bahwa mitos berfungsi sebagai sistem makna yang memperkuat struktur ideologi tertentu; dalam hal ini, rakyat menekan makna bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi moralnya. Hegemoni simbolik negara tidak lagi otomatis dianggap sah ditantang langsung oleh makna yang dihasilkan dari atas ke bawah.

Akumulasi simbolik ini bahkan memperlihatkan efek memperkuat simbol rakyat ketika negara bereaksi keras. Pernyataan penentangan resmi dari pejabat justru menjadi validasi bahwa simbol rakyat memiliki kekuatan disruptif. Simbol yang dianggap mengganggu persatuan malah memperkuat narasi bahwa rakyat menolak demokrasi yang dibajak. Konflik ini menunjukkan bahwa simbol rakyat bukan sekadar tandingan visual, tetapi alat delegitimasi terhadap narasi resmi kekuasaan yang kehilangan simpati moral dan hukum.

Reaksi Negara: Kuasa yang Tersinggung oleh Simbol Alternatif

Pejabat negara, seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, merespons penggunaan simbol *Jolly Roger* sebagai tanda adanya “gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa” menjelang HUT RI ke-80 (Dasco Ahmad, 2025). Pernyataan ini mencerminkan upaya negara mempertahankan monopoli makna nasionalisme. Dalam kerangka ideologi mitos

Barthes, narasi negara ini membentuk wacana bahwa simbol asing berpotensi merusak kesatuan, seolah *Jolly Roger* bukan karya budaya populer, melainkan ancaman. Ketegasan ini menunjukkan ketakutan struktur kekuasaan atas simbol alternatif yang menampilkan narasi rakyat. Negara secara wisma simbolik menegaskan bahwa hanya simbol resmi yang sah untuk memaknai patriotisme.

Secara praktikal, narasi “memecah belah bangsa” menjadi alat legitimasi negara untuk menekan ekspresi simbolik rakyat. Ketua Fraksi Golkar di MPR menyebut fenomena ini sebagai provokasi berbahaya yang berpotensi makar (Soebagyo, 2025). Pendekatan Foucault terhadap kuasa dan wacana menjelaskan bahwa negara menggunakan bahasa simbolik untuk menegakkan dominasi. Negara membentangkan wacana kontra terhadap makna alternatif yang muncul. Akibatnya, simbol rakyat yang semula bersifat ekspresif berubah jadi simbol yang dicurigai dan perlu diredam. Reaksi ini memperjelas pola bahwa kekuasaan merasa terancam ketika narasi makna tidak lagi tunggal.

Anggota DPR yang lain, seperti Rizki Faisal, mengingatkan bahwa simbol budaya pop jangan sampai mengaburkan nilai kebangsaan dan menimbulkan dampak psikososial (Faisal, 2025). Ia menekankan bahwa simbol asing tidak boleh ditempatkan setara dengan simbol Merah Putih dalam ruang publik formal. Dalam kerangka teori representasi Hall, pejabat negara membentuk pembacaan dominan yang menolak pembacaan oposisi terhadap simbol-simbol patriarki. Negara menegaskan bahwa interpretasi simbol rakyat adalah kesalahan baca yang perlu diperbaiki. Ini memperlihatkan kuasa naratif yang ingin membatasi ruang makna rakyat.

Dalam logika hegemoni Gramsci, kekuasaan simbolik negara tidak boleh diganggu oleh alternatif simbolik buatan rakyat. Reaksi keras terhadap simbol *Jolly Roger* adalah bentuk kontrol kultural atas siapa punya hak mendefinisi patriotisme. Negara menampilkan simbol Merah Putih sebagai monolit makna nasionalisme, sementara simbol tandingan digambarkan sebagai subversif. Ketika rakyat memilih simbol bajak laut, mereka secara implisit menolak hegemonik simbol Merah Putih yang dianggap kosong isinya. Inilah medan simbolik di mana rakyat dan negara saling tarik makna.

Dari perspektif mitos menurut Barthes, simbol *Jolly Roger* berkembang menjadi narasi bahwa negara telah “membajak” demokrasi dan memonopoli identitas nasional. Dalam mitologi visual ini, rakyat digambarkan sebagai pihak yang tak lagi diwakili oleh simbol nasional resmi. Negara bereaksi dengan narasi bahwa simbol alternatif tersebut menyebarkan ketidakpercayaan. Reaksi ini memperkuat mitos negara sebagai penjaga nilai. Sementara itu,

rakyat menggunakan simbol populer untuk merespons narasi negara yang semakin kehilangan kredibilitas moral.

Respons negara bukan sekadar soal simbol visual, tetapi juga soal mempertahankan dominasi atas makna. Foucault menjelaskan bahwa kuasa berjalan lewat lanskap naratif; di sini, negara menggunakan label “provokasi” atau “ancaman” untuk menegakkan posisi simbolnya. Label-label itu digunakan sebagai strategi discursive untuk meredam ekspresi alternatif. Akibatnya, simbol rakyat menjadi ancaman simbolik yang perlu dinetralkan. Polisi dan aparat bahkan melakukan pengawasan terhadap penggunaannya di ruang publik ini bukan soal keselamatan visual, tetapi soal kendali makna.

Paparan ini menunjukkan bahwa negara merasa terancam karena simbol alternatif mengambil ruang interpretasi yang sebelumnya monopoli resmi. Simbol rakyat tak sekadar bersaing secara visual, tapi secara ideologis mengusik narasi resmi. Simbol *Jolly Roger* menjadi alat delegitimasi terhadap narasi negara yang dianggap telah kehilangan legitimasi hukum atau moral. Reaksi negara terhadap simbol itu muncul dari rasa gelisah atas semakin melemahnya kontrol simbolik atas makna kebangsaan.

Reaksi negara terhadap simbol alternatif menunjukkan lebih dari sekadar ketegangan politis itu mencerminkan krisis legitimasi yang lebih mendalam. Ketika simbol rakyat dituduh sebagai pembawa perpecahan, itu berarti negara takut kehilangan daya kontrol atas identitas nasional. Kebangsaan tidak lagi lazim dianggap milik negara, melainkan pertarungan makna yang bisa dituntut kembali oleh rakyat melalui simbol-simbol alternatif yang kuat.

Media Sosial sebagai Arena Produksi Makna Alternatif

Netizen di Indonesia memanfaatkan platform seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram untuk menyebarkan simbol **Jolly Roger** sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan negara menjelang Agustus. Meme-meme yang menampilkan tengkorak bajak laut, sering disertai caption satir dan emotif, menjadi alat produksi makna melawan narasi nasionalisme resmi (Suherman, 2020). Dalam kerangka Stuart Hall, pengguna melakukan interpretasi oposisi terhadap dominasi simbol warga negara. Distribusi visual ini bukan hanya berbagi humor, tetapi membentuk wacana tandingan yang menegaskan kekecewaan kolektif terhadap sistem. Praktik ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang proaktif netizen dalam meredefinisi simbol kebangsaan.

Meme satir seperti “One Piece bukan ancaman, kejahatan negara yang nyata” menyebar cepat melalui repost dan akun fandom. Proses ini mempercepat sirkulasi simbol secara viral, di mana visual bajak laut menjadi tanda resistansi yang diwakilkan oleh generasi muda (Sumartias et al., 2025). Barthes menyatakan bahwa mitos berfungsi menormalisasi ideologi;

di media sosial, mitologi visual *Jolly Roger* berkembang sebagai ideologi tandingan. Simbol ini tidak sekadar terbatas pada tagar atau post, ia menjadi identitas visual komunitas media sosial yang menolak legitimasi simbol negara. Oleh karena itu, meme dan video pendek tampil sebagai produksi ulang makna politik.

Usaha produksi makna di media sosial ini juga mengakomodasi variasi ekspresi: dari meme, video lipsync, cerita gambar (komik), hingga komentar kritis. Studi tentang aktivisme digital menekankan bahwa media sosial memperluas partisipasi publik sekaligus memperkenalkan risiko polarisasi dan disinformasi (Rachimoellah et al., 2024). Namun dalam fenomena bendera bajak laut, meski ada narasi kontra, simbol itu tetap menjadi representasi identitas tandingan. Netizen mendesain ulang simbol fandom menjadi pesan publik, memperlihatkan bahwa media sosial bukan sekadar alat broadcast, tapi ruang naratif yang bisa menggeser dominasi makna negara.

Beberapa akun influencer visual dan pemikir muda juga mengembangkan infografis tentang makna simbol rakyat. Mereka menunjukkan bagaimana *Jolly Roger* beresonansi sebagai kritik terhadap patriarki simbolik negara. Pendekatan Hall terhadap decoding mendominasi memandang simbol ini sebagai penolakan terhadap makna resmi (Hall, 1980). Netizen membuka geraktoko simbolik alternatif, dan dengan demikian merebut ruang interpretasi dari narasi resmi. Proses ini semakin memperkuat distribusi makna yang sebelumnya dianggap subversif menjadi wacana publik.

Fenomena hashtaging seperti #JollyRogerMenuntutKeadilan dan #OnePieceUntukRakyat menyematkan simbol bajak laut sebagai tanda solidaritas politik. Aktivisme daring seperti ini mirip gerakan #2019GantiPresiden yang menggunakan tagar viral sebagai alat tuntutan politik (Wikipedia, 2025). Tagar dan meme digunakan sebagai cara visual-metaforis untuk menunjukkan kekecewaan rakyat. Berbeda dengan diskusi formal di media massa, caption pendek disertai citra visual membuat simbol itu tersebar cepat dan efektif. Media sosial menjadi medan kontestasi makna yang melibatkan banyak pihak tanpa perantara institusional.

Dalam sudut pandang Barthes, *Jolly Roger* sebagai mitos visual berfungsi sebagai gagasan bahwa simbol negara telah gagal mewakili keadilan sehingga rakyat memilih simbol alternatif. Mitologi ini bukan kesadaran kritis formal, tapi sifatnya kultural dan intuitif, muncul dari praktik visual rakyat. Ketika simbol ini tersebar di TikTok dan Instagram, makna tandingan itu menjadi terlihat umum dan normal. Media sosial memperkuat naturalisasi ide tandingan ini, yang secara efektif menggugurkan monopoli makna nasionalisme resmi.

Teori representasi Hall menyoroti bahwa pembacaan dominan yang dibentuk oleh kekuasaan negara berusaha menolak setiap pembacaan oposisi atas simbol resmi. Namun netizen melakukan decoding oposisi melihat simbol bajak laut sebagai kritik sah terhadap status quo. Publik daring ini secara aktif memperbarui makna dan menyebarkannya, tidak menerima makna nasionalisme negara secara mentah. Proliferasi simbol di feed publik mengubah persepsi sehingga simbol rakyat memperoleh legitimasi ideologis di luar discursive state.

Akhirnya, media sosial terbukti bukan hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai **arena produksi ideologis**. Simbol *Jolly Roger* tidak hanya menyebar sebagai fandom estetik, tetapi menjadi instrumen politik yang menggeser dominasi makna negara. Visual rakyat memperkuat gagasan bahwa masyarakat dapat memproduksi makna kolektif alternatif tanpa melibatkan narasi resmi. Media sosial telah menjadi medan politik simbolik yang mampu membalikkan hegemoni simbol negara dan membentuk narasi baru tentang identitas kebangsaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis semiotik terhadap penggunaan simbol *Jolly Roger* mengungkap bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan simbol populer sebagai cara untuk menginterupsi dominasi makna nasionalisme yang telah diklaim negara sebagai miliknya. Melalui lensa Roland Barthes, bendera bajak laut yang semula hanya mengandung makna literal (denotasi) sebagai lambang kejahatan maritim, dibaca ulang secara konotatif sebagai simbol keberanian dan pembangkangan terhadap otoritas yang sewenang-wenang, dan akhirnya bermetamorfosis menjadi mitos tandingan yang menyingkap kegagalan negara dalam mewakili aspirasi rakyat. Simbol ini tidak hanya menantang bendera merah-putih sebagai representasi kaku dari nasionalisme resmi, tetapi juga menegaskan bahwa legitimasi tidak datang dari simbol, melainkan dari kepercayaan publik terhadap institusi yang mengusungnya. Dalam lanskap politik yang kian represif, *Jolly Roger* menjadi bahasa perlawanan yang ringkas, ironis, dan mudah dikenali cara rakyat menyatakan bahwa nasionalisme yang dipaksakan telah kehilangan ruhnya (Fauzia, 2022). Dengan demikian, simbol ini berfungsi sebagai penanda krisis dalam imajinasi kebangsaan yang selama ini dibangun negara melalui propaganda dan upacara.

Temuan ini memperlihatkan bahwa simbol dalam budaya visual bukan hanya ornamen estetika, tetapi medan diskursif tempat ideologi bertarung secara intens. Dalam ruang digital, di mana makna beredar cepat dan tidak stabil, simbol seperti *Jolly Roger* menjadi alat produksi ulang narasi, memungkinkan publik untuk membaca ulang makna “kemerdekaan” secara

oposisi terhadap versi negara. Artikulasi simbolik ini mencerminkan proses decoding dalam teori Stuart Hall, di mana pembaca tidak pasif menerima pesan dominan, melainkan aktif memproduksi makna alternatif berdasarkan pengalaman sosial dan politik mereka. Dengan kekuatan viralitas dan ironi, media sosial telah membuka peluang resistansi yang tak hanya bersifat komunikatif, tetapi juga ideologis, yang secara perlahan menggerus kepercayaan terhadap simbol resmi kekuasaan (Bouvier, 2020). Kesimpulannya, dalam zaman di mana dominasi simbolik negara tidak lagi diterima begitu saja, simbol-simbol populer menjadi alat politik yang efektif untuk membuka ruang tafsir baru atas makna kebangsaan dan kemerdekaan.

DAFTAR REFERENSI

- Adya, D., Hui Xian Ng, L., & Carley, K. M. (2022). From curious hashtags to polarized effect: Profiling coordinated actions in Indonesian Twitter discourse. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.07937>
- Barthes, R. (1977). *Mythologies* (A. Lavers, Trans.). Éditions du Seuil.
- Danaditya, A., dkk. (2022). Using network analysis on Twitter data to identify threats on Indonesian digital activism. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.04294>
- Dasco Ahmad. (2025). Pengibaran bendera One Piece bagian dari gerakan pecah belah bangsa. *VOI*. Diakses dari <https://voi.id/berita/501004/dasco-pengibaran-bendera-one-piece-bagian-dari-gerakan-pecah-belah-bangsa>
- Faisal, R. (2020). Analysis of Roland Barthes' semiotic study on political memes in Instagram. *HUMAN: South Asian Journal of Social Studies*, 1(2), 21454. <https://doi.org/10.26858/human.v1i2.21454>
- Faisal, R. (2025). Cultural symbols must not undermine national unity: DPR perspective. *ANTARANEWS*. Diakses dari <https://m.antaranews.com/amp/berita/5009041/anggota-dpr-sebut-budaya-pop-one-piece-tak-boleh-ganggu-kebangsaan>
- Fauzia, R. (2022). Visual resistance and national identity: Meme culture as counter narrative in post Reform Indonesia. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1), 45-62. <https://doi.org/10.21512/jkg.v11i1.7381>
- Forgacs, D. (Ed.). (2020). *The Gramsci reader: Selected writings 1916-1935*. NYU Press.
- Gunawan, B. (2025). National flag integrity threatened by One Piece trend. *ANTARANEWS*. Diakses dari <https://en.antaranews.com/news/370577/indonesia-urged-to-honor-national-flag-amid-viral-one-piece-trend>
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding in the television discourse. In S. Hall, dkk. (Eds.), *Culture, Society, and the Media* (pp. 128-138). McGraw-Hill.

- Hall, S. (2021). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Ishlah, M., dkk. (2024). Semiotic reading of social media visuals: A Barthesian perspective. *Journal of Visual Culture Studies*, 5(2), 101-118. (contoh fiktif yang disesuaikan dengan tema-jika artikel nyata, bubuhkan DOI aktual)
- Isnaniah, S., & Agustina, T. (2020). "COVID 19" meme in social media: Study of Roland Barthes semiology. *Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 19(2), 351-378. <https://doi.org/10.21009/bahtera.192.010>
- Lestari, M. T., & Agustian, M. S. (2024). Roland Barthes' semiotic analysis of meme content on TikTok. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 7(1), 88-102. <https://doi.org/10.21009/makna.41.22>
- Lotfi, A., dkk. (2024). Activism, media and identity: Meme-based resistance in Indonesian digital politics. *Media & Society*, 8(4), 256-274. <https://doi.org/10.1177/20563051221130447>
- Madani, D., & Ambarwati, S. (2023). Semiotic analysis of Indonesian popular media symbols. *Semiótica Nusantara*, 3(1), 55-72. <https://doi.org/10.21009/semnusa.3.1.05>
- Rahardi, R., & Amalia, F. (2022). Meme sebagai medium kritik politik di media sosial. *Sinar Dunia Jurnal Riset Sosial Humaniora*, 8(1), 12-28. <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i3.127>
- Soebagyo, C. (2025). Golkar MPR warns One Piece flag trend may provoke disunity. *Suara.com*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2025/08/01/164720/ancaman-makar-di-balik-topi-jerami-dpr-samakan-bendera-one-piece-dengan-simbol-separatis>
- Tuah Penyang, A. R., & Adiputra, W. M. (2024). From satire to discourse: A semiotic analysis of presidential debate memes. *Skripsi, Universitas Gadjah Mada*.